



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAFRIZAL ZA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 510669

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.076.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1330 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/193 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.776.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 455.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 49.825.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.377.921.864

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.281.060.808



F. HARTA LAINNYA	Rp.	655.000.000
Sub Total	Rp.	12.895.907.672
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.895.907.672

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.